

Algoritmisasi Komunikasi dan Krisis Privasi: Tinjauan Mengenai Kapitalisme Pengawasan di Media Sosial

Putri Sriyati ^{1*}, Halik ²

¹ [Universitas Gajah Putih]

² [Universitas Jabal Ghafur]

*Corresponding Author: [putrisriyati09@gmail.com]

Abstract

Massive data extraction by social media platforms has transformed private communication activities into a primary economic commodity under the regime of surveillance capitalism. This study critically analyzes the phenomenon of systemic privacy erosion and the algorithmization of communication through the lenses of political economy and the sociology of surveillance. Employing a critical literature review method, this study integrates the theoretical frameworks of Nick Srnicek (platform capitalism), José van Dijck (platform society), David Lyon (surveillance culture), Virginia Eubanks (automating inequality), and Evgeny Morozov (critique of digital solutionism). The findings indicate that privacy crisis is neither merely a technical ethical failure nor a corporate moral accident, but rather a structural necessity of the platform business model that demands behavioral commodification for capital accumulation. User consent, constructed through complex policy language, functions as manufactured consent, while addictive platform architectures normalize participatory surveillance in daily life.

Keywords

Algorithmization of Communication, Privacy Crisis, Surveillance Capitalism, Social Media.

Abstrak

Ekstraksi data secara masif oleh platform media sosial telah mentransformasi aktivitas komunikasi pribadi menjadi komoditas ekonomi utama dalam rejim kapitalisme pengawasan. Penelitian ini menganalisis secara kritis fenomena erosi sistemik privasi dan algoritmisasi komunikasi melalui tinjauan ekonomi-politik serta sosiologi pengawasan. Menggunakan metode kajian pustaka kritis (*critical literature review*), kajian ini mengintegrasikan pemikiran teoretis Nick Srnicek (*platform capitalism*), José van Dijck (*platform society*), David Lyon (*surveillance culture*), Virginia Eubanks (*automating inequality*), dan Evgeny Morozov (kritik atas *digital solutionism*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi privasi bukanlah sekadar kegagalan etika teknis atau kecelakaan moral korporasi, melainkan kebutuhan struktural dari model bisnis platform yang menuntut komodifikasi perilaku demi akumulasi modal. Persetujuan pengguna (*user consent*) yang dikonstruksikan melalui bahasa kebijakan yang kompleks berfungsi sebagai bentuk persetujuan yang dimanufaktur (*manufactured consent*), sementara arsitektur platform yang adiktif menormalisasi pengawasan partisipatif (*participatory surveillance*) dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci

Algoritmisasi Komunikasi, Privasi Krisis, Kapitalisme Pengawasan, Media Sosial.

Pendahuluan

Krisis privasi di era kontemporer bukan lagi sekadar persoalan kebocoran data individual atau celah regulasi hukum, melainkan sebuah transformasi struktural yang menandai runtuhnya batas-batas privat dalam lanskap siber abad ke-21. Media sosial, yang dahulu diagung-agungkan sebagai instrumen demokratisasi informasi dan ruang solidaritas sosial (*social connector*), kini telah beralih rupa menjadi mesin ekstraksi modal yang digerakkan oleh logika kapitalisme platform (Srnicsek, 2016). Di dalam apa yang disebut sebagai *platform society* ini, seluruh tatanan interaksi sosial dikendalikan oleh infrastruktur swasta demi kepentingan akumulasi laba korporasi global.

Perubahan radikal ini berakar dari fenomena algoritmisasi komunikasi yang masif. Di dalam ekosistem digital hari ini, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai ruang dialog antarsubjek yang otonom dan merdeka. Sebaliknya, arus informasi, pertukaran makna, dan pola-pola interaksi sosial telah diserahkan sepenuhnya kepada kendali kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan teknologi *machine learning* (Kordi, 2024). Akibat normalisasi pengawasan ini, kehidupan privat manusia tereduksi menjadi komoditas siap saji yang diperjualbelikan di pasar bebas digital.

Gejala inilah yang melahirkan fenomena erosi sistemik privasi, di mana setiap jejak digital, preferensi, dan aktivitas harian pengguna dikomodifikasi secara sistematis sebagai bahan bakar ekonomi korporasi raksasa. Diskursus mengenai perlindungan data dan privasi digital sebenarnya sudah banyak dikaji melalui pendekatan yuridis serta ilmu komputer. Kendati demikian, analisis sosiologis yang membongkar relasi kuasa struktural antara algoritma, kapitalisme pengawasan, dan pergeseran tatanan sosial masih menyisakan ruang kosong yang luas.

Kekosongan tersebut menjadi semakin mendesak ketika ditarik ke dalam konteks Indonesia, sebuah lanskap digital dengan tingkat pertumbuhan pengguna yang sangat tinggi, namun kerap dibarengi oleh kerentanan literasi digital, lemahnya penegakan hukum perlindungan data, serta normalisasi budaya berbagi (*oversharing*) di ruang publik virtual. Artikel konseptual ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau secara kritis bagaimana algoritmisasi komunikasi mendefinisikan ulang batas privat dan publik, serta dampaknya terhadap kerentanan sosial dan kedaulatan digital di Indonesia.

Guna membedah persoalan tersebut secara komprehensif, artikel ini dibangun di atas kerangka teoretis multidimensional yang berpijak pada persimpangan sosiologi digital, ekonomi politik komunikasi, dan studi pengawasan (*surveillance studies*). Pada bagian awal, tulisan ini membedah mekanisme struktural algoritmisasi komunikasi dalam lanskap kapitalisme platform. Selanjutnya, kajian ini menganalisis bagaimana komodifikasi data mengikis kedaulatan privasi individu sebelum akhirnya ditutup dengan refleksi kritis mengenai urgensi perlawanan warga (*digital resistance*) dan kedaulatan digital di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis (*critical paradigm*). Paradigma ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar memetakan fenomena permukaan, melainkan membongkar struktur kekuasaan tersembunyi, relasi eksploitatif, dan ideologi yang melandasi kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*) di media sosial. Secara desain, penelitian ini menerapkan kajian pustaka kritis (*critical literature review*)—sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Grant dan Booth (2009) serta diperluas oleh Hart (2018), untuk memetakan, mendekonstruksi, dan mensintesis perdebatan teoretis mengenai algoritmisasi komunikasi dan erosi privasi di ruang digital.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis pada literatur akademis dan kritis, yang mencakup buku, artikel jurnal bereputasi, dan esai teoretis dari para pemikir utama di bidang ekonomi politik digital, sosiologi pengawasan, dan studi media. Analisis data dilakukan melalui tahapan hermeneutika kritis yang dikembangkan dalam tiga fase utama: (1) reduksi dan pengkodean tematik atas teks-teks literatur, (2) interpretasi kontekstual terhadap dinamika kapitalisme platform, serta (3) penjelasan eksplanatif guna melihat implikasi struktural algoritma terhadap kedaulatan digital.

Guna memastikan validitas teoretis dan kredibilitas analisis, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber literatur. Argumen yang dibangun tidak hanya bersandar pada satu perspektif tunggal, melainkan diuji silang menggunakan berbagai sudut pandang sosiologis yang kontras, mulai dari ekonomi politik radikal (Srnicke), sosiologi pengawasan (Lyon), hingga kritik atas perspektif tersebut (Morozov). Melalui kerangka ini, kajian pustaka kritis mampu menghasilkan sintesis yang objektif, mendalam, dan tahan uji secara akademis dalam membedah krisis privasi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Algoritmisasi Komunikasi dan Eksploitasi Perilaku di Media Sosial

Perkembangan teknologi digital abad ke-21 telah mengubah lanskap interaksi manusia dari ruang fisik konvensional menuju ruang siber yang termediasi oleh algoritma. Perubahan ini melahirkan tatanan interaksi sosial yang perlahan menggeser nilai-nilai publik yang mendasar (van Dijck et al., 2018). Menurut Zuboff (2019), fenomena ini berjalan seiring dengan kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*), di mana pengalaman dan aktivitas harian manusia, mulai dari klik, percakapan, hingga ekspresi emosional, diubah menjadi komoditas perilaku (*behavioral data*) yang bernilai ekonomis tinggi.

Transformasi ini didorong oleh integrasi algoritma komputasi yang tidak hanya berfungsi menyaring informasi, melainkan secara aktif memetakan, memprediksi, dan mengarahkan perilaku pengguna. Dalam arsitektur *surveillance capitalism*, setiap jejak digital, seperti *likes*,

durasi tontonan, interaksi emosional, hingga data lokasi, diestraksi secara kontinu tanpa batasan yang jelas. Aktivitas komunikasi yang semestinya bersifat interpersonal dan otonom kini terkomodifikasi menjadi bahan baku prediksi (*behavioral surplus*) yang dijual kepada entitas pasar demi keuntungan periklanan terpersonalisasi.

Dampak sistemik dari ekstraksi data tanpa henti ini adalah erosi mendalam terhadap privasi individu dan otonomi publik. Ketika batas antara ruang privat dan publik sepenuhnya runtuh, pengguna dijebak dalam narasi persetujuan implisit (*manufactured consent*) yang dirancang secara kompleks melalui kebijakan privasi platform. Algoritmisasi komunikasi pada akhirnya mereduksi makna privasi, dari yang semula merupakan hak dasar perlindungan diri, kini terdegradasi menjadi komoditas pasar yang dieksploitasi demi melanggengkan struktur kekuasaan *Big Tech* dalam ekosistem digital kontemporer.

Komunikasi saat ini tidak lagi sekadar pertukaran pesan antarsubjek yang bersifat otonom, melainkan telah mengalami algoritmisasi. Pengaruh algoritma ini tidak sekadar memediasi komunikasi, melainkan secara aktif membentuk pola perilaku dan memicu ketergantungan digital melalui desain antarmuka persuasif yang mengeksploitasi kerentanan psikologis pengguna (Montag & Elhai, 2023; Jiang, 2026). Meskipun sistem ini menawarkan kenyamanan melalui personalisasi konten, di balik layar terjadi proses komersialisasi privasi yang sistematis serta terciptanya kesenjangan pengetahuan di tengah masyarakat (Moravec et al., 2025).

Komunikasi kontemporer di media sosial sepenuhnya berada di bawah kendali arsitektur algoritmik. Praktik pengumpulan data terselubung ini merupakan konsekuensi struktural dari model bisnis ekonomi digital yang menuntut komodifikasi aktivitas komunikasi pengguna demi kepentingan akumulasi modal. Redefinisi logika privasi ini dilegitimasi secara sistemik oleh kapitalisme data, di mana pengawasan dinormalkan sebagai prasyarat operasional interaksi digital.

Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai literatur ekonomi politik komunikasi dan laporan transparansi industri (seperti Meta dan Google yang dikaji dalam tinjauan pustaka kritis), ekstraksi data secara masif telah mentransformasi komunikasi pribadi menjadi komoditas ekonomi utama. Algoritma secara kontinu mengumpulkan indikator perilaku, mulai dari riwayat pencarian, lokasi presisi, hingga interaksi emosional (*engagement*), untuk memprediksi serta mengarahkan tindakan individu demi kepentingan periklanan terpersonalisasi.

Praktik ini melahirkan kondisi erosi sistemik privasi, di mana batas antara ruang privat dan ruang publik runtuh akibat arsitektur platform yang dirancang untuk pengawasan tanpa henti. Persetujuan pengguna (*user consent*) yang dikonstruksikan melalui bahasa kebijakan yang kompleks pada hakikatnya merupakan legitimasi atas eksploitasi data. Akibatnya, algoritmisasi

komunikasi tidak hanya mereduksi privasi menjadi komoditas, tetapi juga mengekang otonomi individu dalam ekosistem digital modern.

Konstruksi teknologis dari arsitektur platform ini mengandalkan *black box algorithm*, sebuah mekanisme pemrosesan data tertutup yang beroperasi di luar jangkauan pemahaman maupun kontrol langsung pengguna. Melalui teknik pembelajaran mesin (*machine learning*), indikator perilaku diolah secara prediktif untuk memetakan psikografis pengguna. Karakteristik ini memungkinkan platform menciptakan gelembung filter (*filter bubble*) dan ruang gema (*echo chambers*) yang mengkondisikan persepsi, selera, hingga pandangan politik individu demi memaksimalkan waktu pemakaian (*screen time*).

Secara lebih mendalam, implikasi dari pengawasan terstruktur ini tidak hanya mengancam privasi individu pada ranah teknis, tetapi juga mengikis fondasi demokrasi di ruang digital. Ketika otonomi individu lumpuh akibat asimetri informasi antara *Big Tech* dan pengguna, kapasitas masyarakat untuk bernalar kritis turut terdegradasi. Pilihan-pilihan yang diambil individu, baik dalam konsumsi maupun partisipasi publik, merupakan hasil pembentukan perilaku (*behavior modification*) yang berjalan secara samar. Dengan demikian, erosi sistemik privasi dalam rejim *surveillance capitalism* menandai lahirnya era kontrol baru, di mana kekuasaan atas wacana publik dipusatkan pada segelintir korporasi teknologi.

Manifestasi kapitalisme pengawasan tersebut menemukan bentuknya yang khas di Indonesia. Dengan tingkat penetrasi digital yang masif, masyarakat Indonesia kerap dihadapkan pada kerentanan literasi digital dan lemahnya instrumen perlindungan data yuridis di tingkat praksis. Normalisasi budaya berbagi (*oversharing*) di media sosial, dipadu dengan masifnya eksploitasi data oleh algoritma platform global, menciptakan krisis kedaulatan digital yang akut. Tanpa adanya intervensi struktural berupa penguatan regulasi negara dan kesadaran perlawanan warga (*digital resistance*), algoritmisasi komunikasi di Indonesia akan terus melanggengkan eksploitasi struktural dan mengancam otonomi publik jangka panjang.

2. Kultur Pengawasan dan Komodifikasi Ruang Privat

Invasi kapitalisme pengawasan tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan pergeseran karakter masyarakat modern yang menempatkan ekspresi diri dan kultus identitas (*self-cult*) sebagai orientasi utama (Bakti et al., 2022). Keinginan psikologis untuk terus terhubung dan memamerkan keunikan diri di media sosial dimanfaatkan oleh platform digital sebagai bahan bakar utama untuk mengeruk keuntungan ekonomi. Terlebih lagi, praktik pengawasan digital kini telah membudaya dan melekat dalam keseharian masyarakat sebagai cara hidup (Lyon, 2018), di mana invasi kapitalisme pengawasan telah meluas melampaui batas komunikasi fungsional, merambah hingga ke dalam ranah waktu luang (*leisure*) dan struktur kehidupan privat (Barassi, 2020; Cousineau et al., 2023).

Penyerapan ranah waktu luang ke dalam sirkuit akumulasi modal ini menandai perubahan mendasar pada komodifikasi kehidupan sehari-hari. Aktivitas santai, hiburan, dan momen kebersamaan yang dulunya menjadi benteng terakhir ruang privat kini ditransformasikan menjadi proses produksi nilai ekonomi bagi platform digital. Melalui komodifikasi pekerja digital tak dibayar (*unpaid digital labor*), setiap unggahan foto, pencarian hiburan, hingga durasi tontonan di waktu luang dipanen secara otomatis oleh algoritma. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana individu secara sukarela menyerahkan privasi dan data pribadinya demi pemenuhan kepuasan psikologis (*instant gratification*), tanpa menyadari bahwa aktivitas pelepasan penat tersebut pada hakikatnya adalah kerja ekstraktif yang menguntungkan pemilik platform.

Lebih jauh lagi, pelembagaan pengawasan sebagai budaya (*surveillance culture*) mengikis batas kritis masyarakat terhadap bahaya eksploitasi data. Ketika partisipasi aktif di media sosial diposisikan sebagai standar kewajaran sosial, penolakan terhadap pengawasan justru diancam oleh risiko alienasi dan eksklusi sosial. Kebutuhan akan pengakuan (*recognition*) dan validasi publik akhirnya mengalahkan kecemasan atas hilangnya kontrol terhadap data pribadi. Akibatnya, pengawasan tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman struktural dari luar, melainkan diinternalisasi sebagai bagian alami dari ekspresi diri dan identitas digital, sehingga melanggengkan kekuasaan kapitalisme pengawasan dalam melacak setiap celah kehidupan manusia modern.

Praktik pengumpulan data terselubung ini merupakan konsekuensi struktural dari model bisnis ekonomi digital yang menuntut komodifikasi aktivitas komunikasi pengguna demi kepentingan akumulasi modal (Sevignani, 2015). Redefinisi logika privasi ini dilegitimasi secara sistemik oleh kapitalisme data, di mana pengawasan dinormalkan sebagai prasyarat operasional interaksi digital (West, 2019). Normalisasi pengawasan ini mengejawantah melalui mekanisme yang dirancang untuk menciptakan ketergantungan digital secara masif. Ketika akses terhadap jaringan komunikasi, pekerjaan, hingga informasi publik diharuskan melalui platform-platform utama *Big Tech*, pengguna ditempatkan pada posisi tawar yang sangat lemah. Pilihannya direduksi secara dikotomis, yaitu menerima pengawasan total atas data pribadi atau terisolasi secara sosial dan ekonomi dari ekosistem digital kontemporer. Ketiadaan alternatif yang layak ini menjadikan tindakan menyetujui syarat dan ketentuan platform bukan lagi bentuk konsen yang bebas (*informed consent*), melainkan sebuah penyerahan privasi terpaksa demi mempertahankan eksistensi sosial.

Kondisi tersebut mempertegas bagaimana komodifikasi aktivitas komunikasi tidak hanya merugikan pengguna secara individual, melainkan juga melahirkan asimetri kekuasaan yang tajam antara pemilik platform dan masyarakat digital. Data pribadi yang diekstraksi secara kontinu dikonversi menjadi modal prediktif yang memberikan kekuatan bagi korporasi untuk

merekayasa arsitektur informasi. Akibatnya, logika pasar melampaui fungsi dasar media sebagai sarana interaksi, di mana ruang publik digital diubah menjadi laboratorium perilaku di mana setiap tindakan, emosi, dan preferensi komunikasi dimobilisasi demi mengoptimalkan monetisasi iklan terpersonalisasi.

Pada tingkat yang lebih fundamental, reduksi privasi menjadi prasyarat operasional ini mengikis kedaulatan individu atas ruang hidup digitalnya sendiri. Ketika setiap ekspresi dan dinamika hubungan antarmanusia dipantau, diindeks, dan dinilai oleh algoritma kapitalis, makna komunikasi yang autentik mengalami alienasi mendalam. Erosi sistemik privasi ini pada akhirnya melanggengkan struktur kekuasaan timpang, di mana segelintir korporasi teknologi mengontrol sarana produksi komunikasi global, sementara pengguna direduksi posisinya sekadar sebagai penyedia data yang mengekstraksi nilai tanpa pernah memiliki kontrol atas hasil aktivitas digital mereka sendiri.

3. Asimetri Kekuasaan, Kerentanan Sosial, dan Kedaulatan Digital

Ekosistem kapitalisme digital mendorong media sosial dan sistem algoritma beroperasi bukan sekadar sebagai medium interaksi, melainkan sebagai mesin akumulasi modal yang mengkonversi setiap bentuk komunikasi harian menjadi komoditas data bernilai ekonomi. Mekanisme komodifikasi ini secara bertahap mengikis batas-batas privasi dan merusak otonomi individu di dalam ruang publik digital (Fuchs, 2020). Kerentanan privasi di ruang digital ini tidak lagi bersifat individual, melainkan terstruktur secara kolektif melalui sistem jejaring sosial di bawah kendali arsitektur platform (Marwick, 2023). Ilusi kendali diperkuat oleh tombol-tombol pengaturan privasi (*privacy settings*) yang dihadirkan platform sebagai bentuk keterbukaan semu. Pengguna diberikan persepsi seolah-olah mereka memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola siapa yang dapat melihat konten mereka, padahal fitur tersebut hanya membatasi visibilitas antar-pengguna (*peer-to-peer visibility*), bukan membatasi akses platform terhadap ekstraksi data internal. Di balik antarmuka yang tampak demokratis, sistem algoritma tetap melacak, memetakan, dan memanen metadata secara komprehensif di tingkat latar belakang (*background extraction*).

Secara kolektif, sifat terstruktur dari kerentanan privasi ini melahirkan fenomena privasi berjejaring (*networked privacy*), di mana privasi seseorang tidak lagi ditentukan oleh keputusannya sendiri, melainkan oleh perilaku digital jejaring di sekitarnya. Ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan platform tertentu, data pribadinya tetap dapat teridentifikasi melalui kontak yang diunggah oleh pengguna lain, analisis relasional, hingga pelacakan entitas silang (*cross-platform tracking*). Kerentanan sistemik ini menunjukkan bahwa di bawah kendali arsitektur *Big Tech*, privasi telah dirampas kapasitasnya sebagai hak pilihan individual dan diubah

menjadi kondisi kolektif yang rentan, di mana seluruh anggota masyarakat tersedot ke dalam mesin ekstraksi laba tanpa memiliki opsi nyata untuk mengundurkan diri.

Erosi sistemik privasi ini bergeser dari sekadar persoalan teknis menjadi sebuah krisis struktural yang melahirkan asimetri kekuasaan ekstrem antara korporasi teknologi dan masyarakat luas. Raksasa teknologi memegang kendali penuh atas infrastruktur data melalui monopoli pengetahuan (*epistemic monopoly*), sementara pengguna berada pada posisi terdominasi. Asimetri ini dimanifestasikan melalui arsitektur pilihan (*choice architecture*) yang sengaja dirancang untuk mengarahkan perilaku demi memaksimalkan waktu interaksi platform. Dalam konteks ekonomi perhatian (*attention economy*) yang eksploitatif, runtuhnya batas privasi ini berdampak secara tidak proporsional pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan minoritas marginal, yang kerap menjadi target perundungan siber, *cyberstalking*, hingga komodifikasi citra tubuh melalui eksploitasi data visual.

Pada skala yang lebih luas, erosi otonomi individu akibat manipulasi psikologis terselubung berimplikasi langsung pada pelumpuhan kapasitas kewargaan (*citizenship capacity*) dalam masyarakat demokratis. Ketika kebebasan berpikir telah diintervensi oleh prediksi algoritma, kemampuan masyarakat untuk berdiskusi secara rasional di ruang publik digital terdistorsi. Privasi yang tadinya berfungsi sebagai ruang aman bagi individu untuk berefleksi dan membentuk pemikiran kritis lenyap, digantikan oleh bentuk kontrol sosial baru di bawah rejim *surveillance capitalism*.

Lebih jauh lagi, ekspansi kapitalisme platform ini memicu ketergantungan struktural serta menghadirkan tantangan serius terhadap kedaulatan data dan ruang siber nasional (Fauzi et al., 2024; Nastiti, 2025; Widodo et al., 2026). Ketergantungan ini mengejutkan ketika infrastruktur digital nasional hampir sepenuhnya bergantung pada ekosistem komersial *Big Tech* asing, sehingga negara kehilangan kendali atas kedaulatan digitalnya. Ketimpangan geopolitik data ini memperparah posisi kelompok marginal di Indonesia, di mana perempuan tidak hanya menjadi target utama manipulasi preferensi melalui algoritma rekomendasi yang invasif, tetapi juga kehilangan perlindungan atas privasi tubuh dan identitas digital mereka (Lejo, 2021). Tanpa adanya regulasi kedaulatan data yang berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia, ekspansi kapitalisme platform di Indonesia pada akhirnya melanggengkan bentuk kolonialisme digital baru yang memperdalam eksploitasi ekonomi-politik di tingkat lokal.

4. Ekonomi Politik Platform dan Komodifikasi Data

Sebagai landasan ekonomi politik, pemikiran Nick Srnicek (2016) melalui konsep *platform capitalism* menjelaskan bahwa kapitalisme global yang mengalami krisis stagnasi pasca-2008 memerlukan pendorong akumulasi modal yang baru. Dalam lanskap kontemporer ini, data telah bergeser fungsi secara radikal, dari sekadar catatan digital menjadi bahan baku mentah (*raw*

resource) sekaligus faktor produksi esensial yang menggerakkan seluruh sirkulasi modal digital. Platform media sosial bukan lagi ruang netral bagi pertukaran informasi, melainkan infrastruktur monopolistik berbasis kepemilikan privat yang menyedot, memproses, dan memonetisasi data pengguna. Dengan menguasai arsitektur komputasi, platform memiliki wewenang penuh untuk menetapkan aturan main, memantau lalu lintas interaksi, dan menyerap nilai ekonomi dari setiap aktivitas digital.

Logika operasional platform sangat bergantung pada efek jaringan (*network effects*) yang mendorong konsolidasi pasar menuju monopoli. Untuk mempertahankan keunggulan ini, platform menerapkan strategi layanan “gratis” kepada pengguna, yang pada praktiknya merupakan skema pertukaran ketat, yakni akses gratis dibayar melalui penyerahan data perilaku, metadata lokasi, hingga preferensi emosional. Data mentah tersebut diolah oleh algoritma prediktif untuk diproduksi kembali sebagai komoditas periklanan terpersonalisasi. Oleh karena itu, erosi sistemik privasi dan maraknya pengawasan masif bukanlah efek samping yang tidak disengaja, melainkan kebutuhan struktural yang inheren dari kapitalisme platform untuk menjamin keberlangsungan ekstraksi laba.

Kendati demikian, implikasi dari rejim ekstraktif ini tidak berhenti pada ranah akumulasi modal korporasi belaka, melainkan merembes dan mereorganisasi tata kelola kehidupan bermasyarakat secara luas. Untuk melihat bagaimana logika ini beroperasi di tingkat sosial, pemikiran José van Dijck et al. (2018) mengenai *platform society* menjadi sangat krusial untuk melengkapi analisis Srnicek. Jika Srnicek membedah arsitektur monopoli dan logika profit *Big Tech*, van Dijck membongkar bagaimana nilai-nilai publik, khususnya privasi, otonomi warga, dan kebebasan berekspresi, secara sistematis terdegradasi dan dilebur ke dalam mekanisme platform.

Dalam tatanan *platform society*, perusahaan seperti Meta, Google, atau ByteDance bertindak sebagai arsitektur utama yang mengatur lalu lintas sosial, budaya, dan politik. Pengoperasian tatanan sosial ini digerakkan oleh tiga mekanisme utama yang saling berkaitan, yakni datafikasi (*datafication*), komodifikasi (*commodification*), dan seleksi (*selection*). Melalui datafikasi, seluruh interaksi dan ekspresi warga diubah menjadi bentuk data numerik yang dikomodifikasi untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pada tahap akhir, algoritma melakukan seleksi untuk menentukan informasi yang patut dimunculkan atau disembunyikan.

Melalui mekanisme ini, privasi diposisikan bukan lagi sebagai hak asasi yang terlindungi, melainkan komoditas yang dikorbankan agar lalu lintas ekstraksi data berjalan tanpa hambatan. Ketika wacana publik dan tata kelola sosial sangat bergantung pada infrastruktur komersial *Big Tech*, masyarakat secara tidak sadar menyerahkan penentuan nilai-nilai sosialnya kepada keputusan algoritma yang tertutup. Erosi privasi pada akhirnya menjadi manifestasi dari pergeseran kekuasaan yang lebih besar, yakni beralihnya kontrol sosial dari institusi publik

menuju oligopoli teknologi yang menuntut intervensi struktural guna merebut kembali kedaulatan ruang digital.

5. Konvergensi Kuasa dan Budaya Pengawasan

Perspektif sosiologi pengawasan yang dikembangkan oleh David Lyon (2018) memberikan kerangka krusial mengenai bagaimana pengawasan kontemporer tidak lagi beroperasi secara eksklusif dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan telah merembes ke dalam lipatan kehidupan sehari-hari sebagai *culture of surveillance*. Lyon melihat adanya konvergensi yang makin kabur antara kepentingan akumulasi modal korporasi media sosial (*surveillance capitalism*) dan agenda pemantauan keamanan negara (*surveillance state*). Di ruang digital saat ini, pengawasan diinternalisasi sebagai bagian alami dari tata cara bersosialisasi dan membangun identitas. Inti dari pergeseran kultural ini terletak pada praktik pengawasan partisipatif (*participatory surveillance*), di mana pengguna secara sukarela menyerahkan detail paling intim dari kehidupan privat mereka melalui arsitektur platform yang adiktif. Pendorongan ini didasarkan pada mekanisme umpan balik emosional seperti tombol *likes*, *shares*, dan rekomendasi konten demi memenuhi kebutuhan pengakuan sosial (*recognition*).

Pada lanskap budaya ini, bertindak transparan diposisikan sebagai bentuk kewajaran sosial, sementara upaya mempertahankan privasi justru dipersepsikan sebagai tindakan mencurigakan yang berisiko mengeksklusi individu dari jejaring komunitasnya. Oleh karena itu, erosi sistemik privasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai bentuk pelanggaran hukum eksternal atau paksaan teknologis semata. Krisis ini adalah hasil dari proses normalisasi kultural yang dirancang secara sistematis. Ketika tindakan melacak, mengindeks, dan membagikan data harian dianggap sebagai “cara hidup” (*a way of life*), batas antara ruang privat dan publik dileburkan secara halus lewat persetujuan kultural masyarakat. Akibatnya, perlawanan terhadap pengawasan menjadi sangat rumit, karena masyarakat telah dikondisikan untuk merawat infrastruktur digital yang sedang memanen kehidupan mereka.

Kerangka teoretis tersebut perlu diperluas dengan perspektif Virginia Eubanks (2018) melalui konsep *automating inequality*. Kendati kerangka awal Eubanks menyoroti birokrasi negara kesejahteraan, logika pengecualian dan sanksi algoritmik yang sama persis beroperasi di dalam arsitektur komersial *Big Tech*. Eubanks membongkar mitos netralitas teknologi yang kerap diagungkan oleh pengembang sistem, di mana algoritma dan otomatisasi data tidak pernah bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai pelanggeng ketimpangan sistemik yang sudah sarat dengan bias kelas, ras, dan gender.

Pada lanskap media sosial, dampak dari erosi sistemik privasi dan ekstraksi data tidak pernah terdistribusi secara merata (*equally distributed*). Kelompok marjinal, kelas pekerja, perempuan, serta minoritas selalu berada di garis depan kerentanan. Sementara kelompok elit

memiliki sumber daya untuk melindungi ranah privat mereka, kelompok rentan tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) terhadap arsitektur *Big Tech*. Bagi mereka, penyerahan data bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan harga mutlak demi mengakses komunikasi dasar di era digital. *Profiling* berbasis algoritma ini mengejawantah ke dalam bentuk eksploitasi destruktif, mulai dari iklan pinjaman predatorial hingga komodifikasi citra tubuh, yang menjerumuskan kelompok marjinal ke dalam ilusi “rumah tahanan digital” (*digital poorhouse*). Oleh karena itu, analisis mengenai runtuhnya privasi harus ditarik ke dalam diskursus perlawanan terhadap ketidakadilan kelas dan eksploitasi struktural.

6. Kritik Struktural dan Solusionisme Digital

Demi menghindari jebakan analisis yang melihat kapitalisme pengawasan sebagai fenomena otonom, kerangka teoretis artikel ini mengintegrasikan pandangan Evgeny Morozov (2011) untuk mengkritik kecenderungan “solusionisme digital”, yakni keyakinan naif bahwa segala persoalan sosial dapat diselesaikan melalui inovasi teknologi atau perbaikan desain tanpa menyentuh akar strukturalnya. Morozov mengingatkan bahwa erosi sistemik privasi dan kontrol algoritmik bukanlah kecelakaan moral dari segelintir korporasi *Big Tech*, melainkan manifestasi logis dari krisis struktural kapitalisme global. Ketika sektor ekonomi tradisional mengalami kemandekan pasca krisis 2008, modal membutuhkan ruang ekspansi baru, dan logika kapitalis dengan sangat alami memutakhirkan serta mengomodifikasi setiap celah komunikasi harian manusia guna menjaga sirkulasi akumulasinya.

Di sinilah letak bahaya besar dari solusionisme digital. Ideologi dangkal ini sengaja mengisolasi teknologi dari relasi kuasa politik-ekonomi yang memproduksinya. Ketika erosi privasi direduksi sekadar menjadi “masalah etika data” atau “kegagalan regulasi teknis”, publik digiring masuk ke dalam perangkat ideologis yang mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sebenarnya, yaitu kepemilikan privat atas infrastruktur komunikasi. Oleh karena itu, kritik terhadap algoritmisasi komunikasi tidak boleh berhenti pada seruan superfisial agar perusahaan teknologi bersikap lebih etis.

Meskipun konsep *surveillance capitalism* (Zuboff, 2019) dan *platform society* (van Dijck et al., 2018) berhasil membedah mekanisme ekstraksi data di tingkat platform, analisis tersebut berisiko terjebak dalam teknosentrisme jika tidak dipadukan dengan kritik makro Morozov. Algoritmisasi komunikasi tidak hadir di ruang hampa, melainkan digerakkan oleh dinamika kelas dan eksploitasi ekonomi-politik. Jika masyarakat ingin merebut kembali kedaulatan digital, perlawanan harus diarahkan langsung pada sistem kapitalisme makro, yakni dengan menantang monopoli kepemilikan privat atas sarana komunikasi dan menolak cara pandang yang memperlakukan teknologi sebagai kekuatan netral di luar kepentingan modal.

Kesimpulan

Erosi sistemik privasi di media sosial bukanlah sekadar konsekuensi tak terduga dari kemajuan teknologi, melainkan hasil dari konstruksi sistemik rejim kapitalisme pengawasan. Melalui integrasi pemikiran ekonomi-politik dan sosiologi kritis, mulai dari *platform capitalism* (Srnicek), *platform society* (van Dijck), hingga kritik *digital solutionism* (Morozov), terungkap bahwa ekstraksi data pribadi pengguna telah bergeser fungsi menjadi bahan baku dan faktor produksi utama demi akumulasi modal korporasi *Big Tech*. Dalam ekosistem ini, bahasa kebijakan privasi dan persetujuan pengguna (*user consent*) yang kompleks pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen legitimasi atas eksploitasi data, di mana otonomi individu secara perlahan direduksi demi komodifikasi perilaku dan iklan terpersonalisasi.

Secara kultural dan sosiologis, erosi privasi ini dinormalisasi melalui *surveillance culture* dan *participatory surveillance* (Lyon), di mana arsitektur platform yang dirancang adiktif mendorong pengguna secara sukarela menyerahkan ruang privat mereka demi pengakuan sosial dan keterikatan emosional. Namun, dampak dari krisis ini tidak terdistribusi secara merata. Sebagaimana ditegaskan oleh kerangka *automating inequality* (Eubanks), ketimpangan ini menghantam kelompok marjinal dan rentan, terutama perempuan, secara jauh lebih destruktif. Di negara berkembang seperti Indonesia, ketergantungan struktural pada infrastruktur digital asing memperparah asimetri kekuasaan, mengikis kedaulatan data nasional, serta merenggut ruang aman bagi kelompok rentan dari ancaman manipulasi psikologis dan pengawasan terselubung.

Oleh karena itu, mengatasi krisis privasi di era digital tidak dapat dilakukan hanya melalui perbaikan etika teknis, regulasi superfisial, atau imbauan moral kepada pengguna individual. Selama komunikasi manusia tetap dimediasi oleh infrastruktur komersial yang didorong oleh motif profit, privasi akan selalu diposisikan sebagai komoditas yang dikorbankan. Rekomendasi utama dari kajian ini menegaskan perlunya restrukturisasi mendasar atas relasi kuasa ekonomi-politik digital, pembentukan infrastruktur digital publik yang berorientasi pada nilai-nilai kewargaan, serta penegakan kedaulatan data yang berkeadilan sosial demi merebut kembali otonomi individu dan demokrasi di ruang siber.

Daftar Pustaka

- Bakti, I. S., Husen, M., & Ketaren, A. (2022). Consumerism, Romantic Ethics, and Self Cult: A Brief Study of Colin Campbell's Thoughts. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(3), 168-185. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i3.1870>
- Barassi, V. (2020). Datafied Times: Surveillance Capitalism, Data Technologies and the Social Construction of Time in Family Life. *New Media & Society*, 22(9), 1545-1560. <https://doi.org/10.1177/1461444820913573>
- Cousineau, L. S., Kumm, B. E., & Schultz, C. (2023). Surveillance, Capitalism, Leisure, and Data: Being Watched, Giving, Becoming. *Leisure Sciences*, 45(5), 451-474. <https://doi.org/10.1080/01490400.2023.2197455>
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Publishing Group.
- Fauzi, E., Citra, H., Marwenny, E., & Alfitrianti, N. (2024). Control of Personal Data and Cyber Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia's Digital Sovereignty. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 149-157. <https://doi.org/10.69989/5f8ff494>
- Fuchs, C. (2020). *Communication and Capitalism: A Critical Theory*. University of Westminster Press.
- Google LLC. (2024). Google Privacy Policy. *Google Help Center*. <https://policies.google.com/privacy>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91-108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. SAGE Publications.
- Jiang, Y. (2026). Surveillance Capitalism and Social Media Addiction: A Qualitative Exploration of Algorithmic Influence on User Behavior. *Information, Medium & Society: Journal of Publishing Studies*, 24(1), 27-48. <https://doi.org/10.18848/2691-1507/CGP/A35>
- Kordi, M. (2024). Surveillance Capitalism: The Transformation of Raw Online Data into Valuable Assets by High-Tech Companies—Is AI Governance a Threat or a Solution to Our Privacy Concerns?. In *The Palgrave Handbook of Sustainable Digitalization for Business, Industry, and Society* (pp. 401-416). Springer International Publishing.
- Lejo, B. P. P. (2021). Kerentanan Perempuan dalam Surveillance Capitalism. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(2), 66-74. <https://doi.org/10.22146/jwk.3616>
- Lyon, D. (2018). *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*. Polity Press.
- Marwick, A. E. (2023). *The Private is Political: Networked Privacy and Social Media*. Yale University Press.
- Meta Platforms, Inc. (2024). Meta Transparency Center: Data Requests and Community Standards Enforcement. *Meta*. <https://transparency.fb.com>
- Montag, C., & Elhai, J. D. (2023). On Social Media Design,(Online-) Time Well-Spent and Addictive Behaviors in the Age of Surveillance Capitalism. *Current Addiction Reports*, 10(3), 610-616. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00494-3>
- Moravec, V., Hynek, N., Skare, M., Gavurova, B., & Polishchuk, V. (2025). Algorithmic Personalization: a Study of Knowledge Gaps and Digital Media Literacy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-12. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04593-6>

- Nastiti, A. D. (2025). *Behind the Digital Boom: Proprietary Market and Platform Capitalism Expansion in Indonesia* (Doctoral Dissertation, Northwestern University). ProQuest Dissertations and Theses Global.
- Sevignani, S. (2015). *Privacy and Capitalism in the Age of Social Media*. Routledge.
- Srnicek, N. (2016). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connected World*. Oxford University Press.
- West, S. M. (2019). Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy. *Business & Society*, 58(1), 20-41. <https://doi.org/10.1177/000765031771818>
- Widodo, S., Kristiyono, J., Aji, G. G., & Zulaikha, Z. (2026). Digital Capitalism and Platform Dependency in Indonesia: Media, Power, and Political Economy. *The Journal of Society and Media*, 10(1), 36-57. <https://doi.org/10.26740/jsm.v10n1.p36-57>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.